

# WARTAWAN

## Dugaan Korupsi BLUD RSUD Sampang, Kejaksaan Dalami Kerugian Negara Rp 3,3 Miliar

Updates. - [SAMPANG.WARTAWAN.ORG](http://SAMPANG.WARTAWAN.ORG)

Dec 9, 2025 - 13:31



Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sampang, Diecky Eka Koes Andriansyah

SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang tengah menggali lebih dalam dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Mohammad Zyn Sampang. Investigasi maraton ini menyangkut para pihak yang diduga terlibat dalam

pengelolaan dana rumah sakit plat merah milik Pemerintah Kabupaten Sampang tersebut.

Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sampang, Diecky Eka Koes Andriansyah, hingga saat ini enam orang telah dimintai keterangan. Namun, status mereka masih berstatus saksi dalam proses hukum yang berjalan.

"Sejak 28 November 2025 penanganan kasus ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Hingga hari ini sudah 6 orang yang kami periksa," kata Diecky kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Diecky mengungkapkan bahwa tim penyidik bergerak lebih gesit dari biasanya. Kecepatan ini didorong oleh adanya hasil audit dari Inspektorat yang mengindikasikan potensi kerugian daerah mencapai Rp 3,3 miliar.

"Saat kami (tim penyidik) tindaklanjuti dalam penyelidikan, ditemukan potensi kerugian negara lebih besar dari temuan inspektorat. Sehingga kami harus melakukan penyidikan lebih mendalam," ujarnya.

Proses penyidikan ini disebut lebih intensif, terutama dalam upaya memperoleh data yang sebelumnya sulit didapatkan dari para saksi saat tahap penyelidikan.

"Di penyidikan ini data yang tidak bisa diperoleh dan dipenuhi dari para saksi dalam penyelidikan sebelumnya akhirnya didapatkan dengan upaya paksa (penggeledahan dan penyitaan) barang bukti dokumen," imbuhnya.

Meskipun demikian, Diecky menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam menetapkan tersangka. Ia mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar akan ada lebih dari satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Ini menyangkut kepastian hukum seseorang tidak bisa terburu-buru. Masih banyak saksi yang akan diperiksa, agar keterlibatan para pihak terungkap dengan tuntas," tandasnya. (PERS)